

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, Efektivitas Layanan Fasilitas Barang Milik Negara (BMN) di Subbagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tercapai melalui penerapan prosedur yang standar dan transparan. Prosedur tersebut meliputi pengajuan permohonan tertulis, verifikasi, dan validasi yang ketat, serta komunikasi yang terstruktur baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan pengadaan barang dan kesalahan data, diupayakan untuk diminimalisir melalui peningkatan sistem informasi dan fasilitas fisik. Faktor transparansi dalam prosedur dan dokumentasi, responsivitas pegawai, serta koordinasi tim yang baik berperan penting dalam memastikan pelayanan yang efisien dan akuntabel. Evaluasi dan monitoring berkala, serta pengumpulan umpan balik dari pengguna layanan, juga menjadi aspek penting dalam upaya perbaikan dan optimalisasi layanan. Beberapa kendala utama, seperti keterlambatan pengadaan barang, kurangnya ketersediaan barang, kesalahan administratif, dan hambatan komunikasi, menunjukkan perlunya peningkatan sistem online dan koordinasi yang lebih intensif. Selain itu, peningkatan fasilitas fisik, seperti ruang penyimpanan yang memadai dan pemantauan stok barang yang lebih baik, menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan kelancaran

pelayanan. Kompetensi dan profesionalisme staf juga menjadi faktor penting dalam memberikan solusi yang tepat waktu dan memadai, sementara implementasi teknologi informasi yang efektif, prosedur pelayanan yang jelas, dan budaya kerja yang kolaboratif mendukung terciptanya lingkungan pelayanan yang responsif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran dapat diusulkan untuk peningkatan pelayanan di Subbagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri:

1. Untuk Subbagian Umum Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, peneliti menyarankan untuk mengimplementasikan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan peminjaman dan pengadaan BMN. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi, pemantauan stok barang, dan mengurangi kesalahan administratif. Penting juga untuk memastikan bahwa sistem ini mudah diakses dan digunakan oleh seluruh pegawai serta pengguna layanan. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan frekuensi rapat koordinasi rutin dan komunikasi antar unit dalam Subbagian Umum, menggunakan platform digital seperti email atau aplikasi pesan instan, guna memastikan kelancaran alur kerja, mengurangi potensi miskomunikasi, dan meningkatkan responsivitas terhadap permintaan peminjaman atau pengadaan BMN.

2. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait implementasi teknologi informasi di Subbagian Umum, dengan fokus pada dampaknya terhadap efisiensi pelayanan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

